ABSTRAKSI RKPD 2016

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Substansi RKPD adalah rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RKPD tidak hanya akan didanai oleh anggaran daerah, tetapi juga akan didukung program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 antara lain adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk menyusun prioritas pembangunan daerah, dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Evaluasi ini pada dasarnya merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987) dan Wiyogo Atmodarminto (1987-1992).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).

Pengganti Gubernur Wiyogo Atmodarminto adalah Gubernur Sutiyoso yang memimpin Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun ini terjadi peningkatan dari 5,9 - 6,3 persen menjadi 6,2 - 6,6 persen, inflasi juga diprakirakan akan terjadi penurunan dari tahun 2015 sebesar 5,0 - 6,0 persen dan pada tahun 2016 menjadi 4,1 - 4,5 persen. Selanjutnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah dari Rp. 11.900.-/per dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 menjadi Rp. 12.800 – 13.200.-/ per dolar Amerika Serikat pada tahun 2016.

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2016 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017. Adapun

substansi dokumen RKPD tahun 2016 mendasarkan dan memperhatikan : Arah Kebijakan Pemerintah Pusat , Arah kebijakan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017, Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi DKI Jakarta dan solusinya.

Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita).

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2016.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2013-2017. Selanjutnya RKPD Tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dengan visi:

"Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dan Dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik",

dan misi pembangunan sebagai berikut (1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain; (3) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota; (4) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; dan (5) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Program dan kegiatan prioritas merupakan progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017.

Proses penyusunan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dilakukan melalui lima pendekatan yaitu Teknokratik, partisipatif, politik, *top down - bottom up* sehingga diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta. Selain itu materi penyusunan program dan kegiatan adalah Hasil reses yang merupakan pokok – pokok pikiran sebagai bahan utama penyusunan RKPD 2016 setelah diparipurnakan dan hasil rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2016 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di provinsi DKI Jakarta.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.